

**Kajian Ketersediaan Sarana dan Prasarana  
Pendidikan Dasar (SD/MI) dan Menengah Pertama (SMP/MTS)  
di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora Tahun 2020  
(Implementasi Dalam Pembelajaran Geografi Kelas XI Pada Materi  
Kualitas Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia)**

**Rahma Nur Aprilia<sup>1</sup>, Sugiyanto<sup>2</sup>, Singgih Prihadi<sup>3</sup>**

Program Studi Pendidikan Geografi

Universitas Sebelas Maret

rahmaapriliya219@gmail.com

**Abstrak**

Ketersediaan sarana pendidikan di suatu daerah perlu disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana untuk melayani kebutuhan penduduk suatu daerah. Evaluasi ketersediaan fasilitas pendidikan penting untuk mengembangkan pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan dianalisis secara deskriptif. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pola distribusi sarana pendidikan, menganalisis ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan serta kebutuhan sarana pendidikan di Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebaran SD memiliki pola berkerumun dan SMP memiliki pola acak yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, bahwa sarana dan prasarana pendidikan SD dan SMP tidak mencapai standar baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga diperlukan perbaikan dan penambahan terhadap ketersediaan seluruh sarana pendidikan SD dan SMP yang telah terpenuhi. untuk melayani semua penduduk usia sekolah. Keberadaan sekolah dan pemenuhan sarana dan prasarana sangat penting bagi suatu daerah.

Kata Kunci: Pola distribusi, sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, pembangunan daerah.

## A. PENDAHULUAN

Suatu wilayah akan terus mengalami perkembangan seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi, sosial dan budaya serta politik. Contoh perkembangan wilayah adalah tersedianya fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi. Keberadaan fasilitas sosial dan ekonomi sangat penting untuk masyarakat dalam menunjang setiap kegiatannya yang terdiri dari berbagai macam bidang yaitu fasilitas pelayanan sosial yang mencakup pendidikan, air bersih, perumahan, rumah ibadah. Dalam bidang penyedia sarana fasilitas pelayanan ekonomi yaitu mencakup pasar, bank, koperasi, pertokoan, kedai.

Setiap daerah memiliki kebutuhan fasilitas pelayanan yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti karakteristik geografis suatu daerah, potensi daerah, jumlah penduduk serta aktivitas penduduk pada suatu daerah. Fasilitas pendidikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang penting dalam masyarakat, karena pendidikan merupakan aspek yang vital dalam rangka meningkatkan kualitas

sumberdaya manusia di suatu daerah.

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, dimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 31. Dalam rangka mengembangkan pendidikan di Indonesia sudah semestinya memperhatikan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah tersebut. Sarana dan prasarana pendidikan telah diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan, karena pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar pada tiap sekolah.

Pertumbuhan penduduk dan penyediaan fasilitas pelayanan publik memiliki hubungan erat, karena semakin banyaknya jumlah penduduk maka ketersediaan fasilitas pelayanan juga harus dapat memenuhi guna menunjang aktivitas sosial dan ekonomi penduduk dalam suatu wilayah. Pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan akan fasilitas pelayanan sosial dan ekonomi terutama untuk kebutuhan fasilitas pendidikan juga semakin meningkat.

Persebaran layanan pendidikan yang tidak merata juga akan menimbulkan permasalahan tersendiri. Demikian halnya dengan persebaran sekolah, karena hal tersebut dapat menimbulkan permasalahan

seperti kekurangan peserta didik pada suatu sekolah yang terjadi dan banyaknya sekolah yang melayani peserta didik dari luar wilayah normatifnya. Mengetahui pola persebaran sekolah juga dirasa penting untuk mengetahui apakah persebaran sekolah di suatu daerah merata atau tidak karena hal tersebut berpengaruh pada jangkauan pelayanan suatu fasilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, perlu dilakukn penelitian tentang pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan serta ketersediaan fasilitas pendidikan di Kecamatan Sambong. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pola persebaran SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Sambong.
2. Mengidentifikasi ketersediaan sarana dan prasarana sekolah berdasar Peraturan Menteri Pendidikan No. 24 Tahun 2007 di Kecamatan Sambong.
3. Mengetahui ketersediaan fasilitas layanan pendidikan tingkat SD/MI dan SMP/MTs berdasarkan batasan administrasi terhadap jumlah penduduk anak usia sekolah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian berada di seluruh SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Sambong Kabupaten Blora yang terdiri dari 26SD/MI dan 3 SMP/MTs. Pola sebaran sekolah tingkat SD/MI dan SMP/MTs dianalisis dengan menggunakan analisis parameter tetangga terdekat. Menurut Bintarto dan Surastopo Hadisumarmo (1979:75) rumus tetangga terdekat adalah sebagai berikut:

$$T = \frac{J_u}{J_h}$$

Keterangan:

- T= Indeks persebaran tetangga terdekat
- J<sub>u</sub>= Jarak rata-rata yang diukur antara satu titik dengan titik tetangga terdekat
- J<sub>h</sub>= Jarak rata-rata yang diperoleh andaikan semua titik memiliki pola random, Jika J<sub>h</sub> sebagai berikut:

$$J_h = \frac{1}{2\sqrt{p}}$$

Dimana P = Kepadatan titik tiap kilometer yaitu jumlah titik (N) dibagi luas wilayah (A)

Selanjutnya untuk mengkaji ketersediaan sarana dan prasarana, data kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah diperoleh dari observasi langsung dan analisis dokumen berupa data inventaris pada tiap sekolah, sehingga dari data tersebut dapat dievaluasi dengan

Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007. Pada hakikatnya, ketersediaan fasilitas pendidikan didasarkan pada daya tampung peserta didik pada satu kelas dan jumlah penduduk usia sekolah pada suatu daerah. Sehingga dengan analisis tersebut dapat

diketahui apakah jumlah penduduk usia sekolah dapat terlayani oleh fasilitas pendidikan yang tersedia pada suatu daerah. Ketersediaan fasilitas pendidikan dihitung menggunakan rumus Angka Partisipasi Murni yang dimodifikasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 yaitu sebagai berikut:

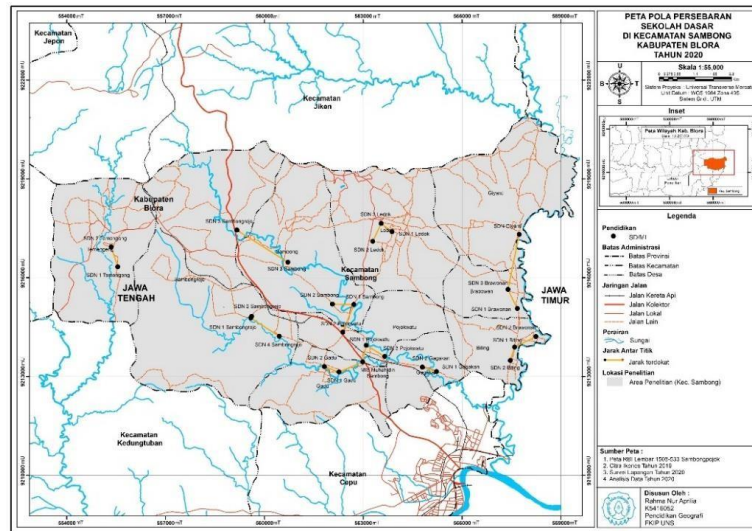
$$APM = \frac{\text{Jumlah penduduk kelompok usia A yang bersekolah di B pada tahun C}}{\text{Jumlah penduduk usia A}} \times 100$$

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pola Sebaran SD/MI dan SMP/MTs

Persebaran fasilitas pendidikan diketahui dari hasil plotting titik koordinat lokasi masing-masing SD/MI menggunakan GPS. Plotting lokasi dilakukan di seluruh SD/MI yang berjumlah 26 sekolah dan 3 SMP/MTs berjumlah 3 sekolah yang tersebar pada setiap desa di Kecamatan Sambong yang memiliki luas 88,75 km<sup>2</sup>. Dari hasil plotting, jumlah jarak (J) antar SD/MI yang saling berdekatan yaitu 12,52 km<sup>2</sup>

sedangkan SMP/MTs memiliki jumlah jarak 6,4 km<sup>2</sup>. Dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil bahwa pola persebaran SD/MI di Kecamatan Sambong memiliki pola acak (*random*) karena memiliki nilai indeks persebaran tetangga terdekat (T) yang lebih mendekati angka 1 yaitu 0,52. Untuk pola persebaran SMP/MTs di Kecamatan Sambong memiliki pola acak (*random*) karena memiliki nilai indeks persebaran tetangga terdekat (T) yaitu 0,78 karena T mendekati angka 1. Dari hasil perhitungan tersebut, dapat ditampilkan peta sebaran fasilitas pendidikan seperti pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Peta Pola Persebaran Sekolah Dasar di Kecamatan Sambong



Gambar 2. Peta Pola Persebaran Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sambong

Persebaran fasilitas pendidikan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik tersebut meliputi penggunaan lahan, lokasi, jarak dan aksesibilitas. Sedangkan faktor

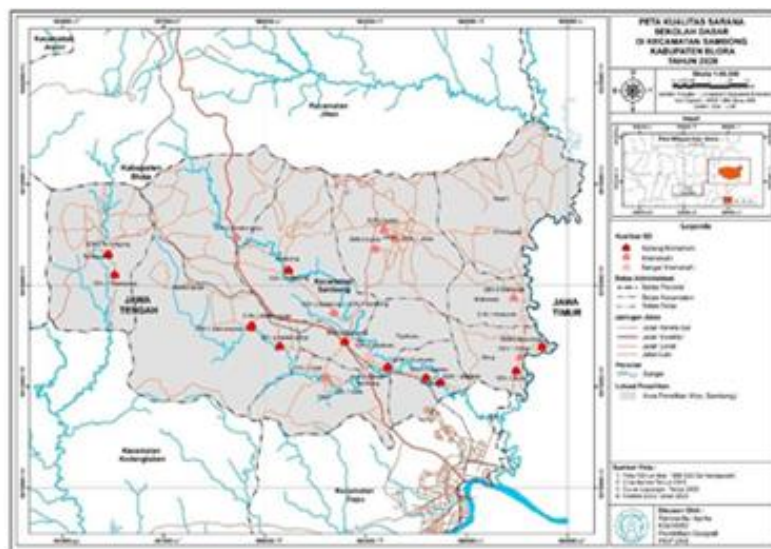
sosial yaitu jumlah penduduk pada setiap desa. Penggunaan lahan di sekitar fasilitas pendidikan didominasi oleh permukiman yang biasanya berada di sekitar jalan lokal dan kolektor. Lokasi berpengaruh pada daya tarik penduduk dan jangkauan dari permukiman ke

sekolah. Faktor aksesibilitas berkaitan dengan jaringan dan kondisi jalan. Sebagian besar kondisi jalan di Kecamatan Sambong dalam kondisi rusak terutama pada desa- desa yang jauh dari jalan kolektor dan pusat pemerintahan.

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Ketersediaan sarana prasarana penunjang pendidikan telah diatur dalam Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/MI dan SMP/MTs, dimana terdapat 11 prasarana untuk SD/MI dan 14 prasarana untuk SMP/MTs. Ketersediaan sarana dan prasarana kemudian dipersentasikan dan

diklasifikasikan dalam 3 kelas yaitu sangat memenuhi, memenuhi, dan kurang memenuhi. Pertama yaitu analisis ketersediaan sarana dan prasarana SD/MI. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, ketersediaan pada sarana ruang kelas, ruang guru, tempat ibadah, dan tempat olahraga sebagian besar sudah termasuk dalam kelas sangat memenuhi yaitu mencakup 13 sekolah dan memenuhi mencakup 11 sekolah, dan 2 sekolah termasuk kurang memenuhi. Sedangkan pada sarana lain seperti perpustakaan, ruang pimpinan, laboratorium IPA, ruang UKS, gudang, kamar mandi pemenuhan sarannya masih banyak yang termasuk dalam klasifikasi memenuhi bahkan kurang memenuhi. Ketersediaan sarana pendidikan tingkat SD/MI dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Peta Kualitas Sarana Sekolah Dasar di Kecamatan Sambong

Berdasarkan Gambar 3, ketersediaan sarana pendidikan SD/MI secara keseluruhan masih banyak yang termasuk dalam klasifikasi kurang memenuhi yaitu 12 SD/MI dari 26 SD/MI yang ada di Kecamatan Sambong. Terlebih lagi pada masa pandemi ini, banyak sarana yang kondisinya rusak parah karena perawatannya tidak dapat dilakukan dengan maksimal serta tidak pernah digunakan dalam waktu yang cukup lama sehingga ruangan menjadi lembab dan banyak sarana tidak

terawat. Setiap sekolah SD/MI di Kecamatan Sambong masih banyak yang tidak memiliki rekapitulasi atau catatan jumlah sarana di setiap ruang yang ada, sehingga pihak sekolah tidak mengetahui dengan lengkap sarana yang masuk maupun yang keluar dari sekolah dan sarana apasaja yang rusak dan perlu diganti. Rincian klasifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan SD/MI di Kecamatan Sambong yang ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Ketersediaan Sarana Pendidikan SD/MI di Kecamatan Sambong

<b>Klasifikasi Ketersediaan Sarana Pendidikan SD/MI Kecamatan Sambong</b>		
<b>Sangat Memenuhi (78%-100%)</b>	<b>Memenuhi (56%-77%)</b>	<b>Kurang Memenuhi (33%-55%)</b>
SDN Giyanti	SDN 2 Ledok	SDN 1 Temengeng
SDN 1 Pojokwatu	SDN 2 Sambong	SDN 2 Temengeng
SDN 1 Sambong	SDN 1 Ledok	SDN 1 Sambongrejo
MI Mujahidin Sambong	SDN 3 Ledok	SDN 2 Sambongrejo
SDN 1 Gadu	SDN 3 Sambongrejo	SDN 4 Sambongrejo
	SDN 1 Brabowan	SDN 3 Sambong
	SDN 2 Gadu	SDN 2 Pojokwatu
	SDN 1 Biting	SDN 3 Pojokwatu
	SDN 3 Brabowan	SDN 1 Gagakan
		SDN 2 Gagakan
		SDN 2 Biting
		SDN 2 Brabowan

*Sumber: Hasil Olah Data*

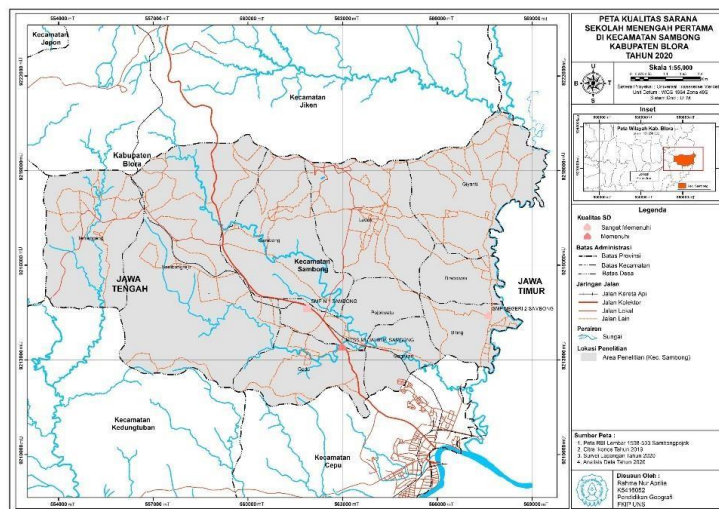
Ketersediaan sarana tersebut dianalisis berdasarkan pada pemenuhan sarana pada tiap prasarana di tiap sekolah sehingga. Dari Tabel 1 dapat SD/MI di Kecamatan Sambong mayoritas belum memiliki sarana ruang yang sesuai dengan standar pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007, karena masih banyak sarana yang belum tersedia maupun tersedia namun tidak dapat digunakan dengan maksimal karena kondisinya yang sudah rusak.

Berbeda dengan ketersediaan sarana SD/MI, ketersediaan sarana SMP/MTs sebagian besar sudah tergolong sangat memenuhi. Terdapat tiga sekolah jenjang SMP/MTs yang mana dua sekolah merupakan SMP negeri dan satu

sekolah merupakan madrasah dengan status swasta.

Sarana ruang pimpinan, tempat ibadah, ruang bimbingan konseling, ruang tata usaha, gudang, perpustakaan, dan tempat bermain/berolahraga mayoritas termasuk dalam kelas sangat memenuhi yang mana persentase ketersediannya yaitu 87% hingga 100%. Sedangkan sarana lainnya masih ada yang termasuk dalam kelas kurang memenuhi. Hal ini dikarenakan oleh dana yang belum ada atau memprioritaskan pemenuhan sarana lain yang dirasa lebih penting.

Secara keseluruhan, SMPN 1 Sambong dan SMPN 2 Sambong termasuk dalam kelas sangat memenuhi dan MTs Mujahidin termasuk dalam kelas memenuhi karena sarana yang seharusnya tersedia belum ada sehingga pemenuhannya masih harus dilakukan penambahan maupun perbaikan.

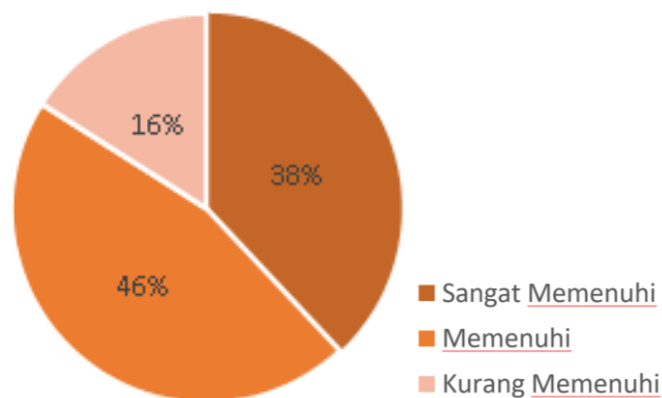


Gambar 4. Peta Kualitas Sarana Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sambong



Hasil mengenai ketersediaan prasarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang mana setiap SD/MI minimal memiliki 11 prasarana dan SMP/MTs minimal memiliki 14 prasarana yang seharusnya tersedia pada sebuah satuan pendidikan. Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, ketersediaan prasarana pendidikan SD/MI di Kecamatan Sambong terdapat 10 SD/MI termasuk dalam kelas sangat memenuhi, 12 SD/MI termasuk dalam kelas memenuhi, dan 4 SD/MI termasuk dalam kelas kurang memenuhi. SD/MI di Kecamatan Sambong mayoritas sudah memenuhi prasarana yang seharusnya tersedia

berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/MI. Prasarana yang banyak tidak dimiliki SD/MI adalah ruang laboratorium IPA hanya tersedia di 1 SDN, prasarana tempat ibadah hanya tersedia di 9 SD/MI, dan ruang pimpinan hanya tersedia di 10 SD/MI. Prasarana yang perlu dilakukan penambahan gedung maupun perbaikan adalah ruang kelas, karena di beberapa sekolah ruang kelas hanya tersedia lima kelas, artinya dua kelas dijadikan satu dalam satu ruangan. Sehingga penambahan prasarana yang belum ada perlu dilakukan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Berikut merupakan diagram ketersediaan prasarana pendidikan SD/MI di Kecamatan Sambong:



Gambar 5. Diagram Persentase Ketersediaan Prasarana Pendidikan SD/MI di Kecamatan Sambong

Prasarana SMP/MTs di Kecamatan Sambong, mayoritas termasuk dalam kelas sangat memenuhi. Dari dua SMPN yang ada di Kecamatan Sambong termasuk

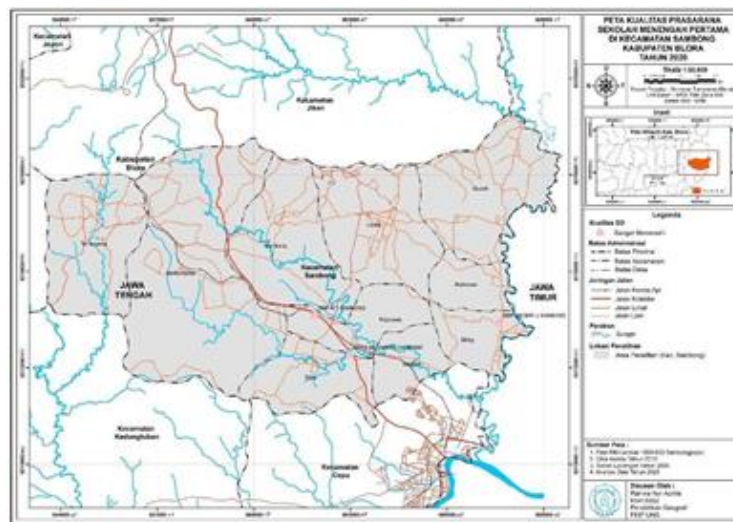
dalam kelas sangat memenuhi karena prasarana yang seharusnya tersedia berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang berjumlah 14 prasarana sudah tersedia dengan lengkap. Sedangkan

di MTs Mujahidin yang merupakan sekolah swasta, tersedia 12 dari 14 prasarana yang seharusnya ada sehingga masuk dalam kelas memenuhi. Prasarana atau ruang yang belum tersedia di MTs Mujahidin adalah ruang BK dan ruang OSIS. Namun, secara keseluruhan ketiga SMP/MTs di Kecamatan Sambong memiliki persentase ketersediaan prasarana yang termasuk dalam kelas sangat memenuhi karena memiliki lebih dari 12 prasarana yang seharusnya tersedia.

Prasarana yang ada di SMP/MTs mayoritas memiliki kondisi

yang baik. Tetapi, beberapa prasarana ada juga yang kondisinya rusak ringan. Permasalahan prasarana diantara tiga sekolah tersebut secara umum sama seperti tembok kelas yang retak, plafon ruangan mengelupas dan berjamur, lantai yang tidak rata, serta kamar mandi yang tidak bisa dikunci. Kondisi prasarana pada masa pandemi ini banyak yang menjadi rusak karena lama tidak digunakan. Hal ini disebabkan karena perawatan yang kurang. Pada umumnya, bangunan-bangunan yang tidak lama digunakan maka akan menjadi tidak terawat dan menyebabkan kerusakan.

Gambar 6 menampilkan kualitas prasarana SMP/MTs di Kecamatan Sambong.



Gambar 6. Peta Kualitas Prasarana Sekolah Menengah Pertama di Kecamatan Sambong

3. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan berdasarkan Jumlah Penduduk Usia Sekolah
- Jumlah eksisting fasilitas pendidikan tingkat SD/Sederajat di Kecamatan Sambong yaitu 26 fasilitas untuk melayani 29.070 jiwa secara keseluruhan dan khususnya untuk penduduk usia sekolah tingkat

SD/Sederajat sejumlah 2.346 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk usia sekolah pada setiap desa dibandingkan dengan jumlah rombongan belajar untuk mengetahui status kapasitas daya tampung siswa pada fasilitas pendidikan yang ada di masing-masing desa.

Berdasarkan rumus ketersediaan fasilitas pendidikan, maka dapat diketahui ketersediaan

fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Sambong. Pada Tabel 1. ditampilkan hasil perhitungan ketersediaan fasilitas pendidikan dengan menggunakan rumus tersebut yang membandingkan jumlah standar peserta didik yang dapat ditampung pada setiap satu sekolah yaitu 2000 peserta didik (Y) dengan jumlah fasilitas pendidikan eksisting di Kecamatan Sambong sehingga dapat diketahui status ketersediaan fasilitas pendidikan di setiap desa.

Tabel 2. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan SD/MI Kecamatan Sambong

<b>Desa</b>	<b>Jumlah Penduduk (X)</b>	<b>Jumlah Faspem Minimal (X/Y)</b>	<b>Jumlah Faspem Eksisting</b>
Temengeng	2.323	1	2
Sambongrejo	3.524	2	4
Gadu	4.310	2	3
Sambong	2.812	1	3
Pojokwatu	3.450	2	3
Gagakan	1.789	1	2
Biting	2.691	1	2
Brabowan	2.430	1	3
Ledok	3.369	2	3
Giyanti	2.372	1	1
<b>Kecamatan Sambong</b>	<b>29.070</b>	<b>14</b>	<b>26</b>

*Sumber: Olah Data Penelitian*

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa fasilitas pendidikan yang ada pada tiap desa

di Kecamatan Sambong sudah terpenuhi. Artinya sudah mencukupi bahkan kelebihan untuk melayani penduduk

berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Sehingga dari SD/MI yang ada dapat melayani seluruh penduduk pada satu desa.

Perhitungan ketersediaan fasilitas pendidikan yang dilihat dari daya tampung sekolah yang ada di Kecamatan Sambong dibandingkan dengan jumlah penduduk usia sekolah SD, sehingga dapat diketahui apakah daya tampung sekolah pada suatu desa telah digunakan secara maksimal (terpenuhi) atau terdapat kelebihan jumlah peserta didik (*over capacity*) yang menandakan kurangnya fasilitas pendidikan dan kekurangan peserta didik (*under capacity*) yang menandakan kelebihan jumlah fasilitas pendidikan. Untuk menghitung ketersediaan daya tampung atau kapasitas fasilitas pendidikan ini menggunakan perbandingan jumlah penduduk usia sekolah SD (7-12 Tahun) yang ada di Kecamatan Sambong dengan daya tampung peserta didik pada satu kelas (28 peserta didik).

Dari hasil analisis, dengan penduduk usia sekolah yang berjumlah 2.346 anak, dari standar yang ada memerlukan 104

rombongan belajar/kelas yang berarti satu desa memerlukan 1 hingga 3 SD/MI. Pada kondisi yang ada, rombongan belajar/kelas yang tersedia di Kecamatan Sambong terdapat 156 sekolah dimana setiap desa memiliki 1 hingga 4 SD/MI. Bahkan rombongan belajar pada setiap sekolah banyak yang kekurangan peserta didik.

Untuk mengetahui ketersediaan fasilitas pendidikan juga dilakukan dengan analisis berdasarkan daya tampung peserta didik dari jumlah penduduk usia sekolah yang ada di Kecamatan Sambong memiliki penduduk usia sekolah yang berjumlah 2.346 anak. Berdasarkan standar yang ada memerlukan 104 rombongan belajar/kelas yang berarti satu desa memerlukan 1 hingga 3 SD/MI. Pada kondisi yang ada, rombongan belajar/kelas yang tersedia di Kecamatan Sambong terdapat 156 sekolah dimana setiap desa memiliki 1 hingga 4 SD/MI. Bahkan rombongan belajar pada setiap sekolah banyak yang kekurangan peserta didik.

Dari penjelesana sebelumnya dapat diketahui bahwa setiap desa di Kecamatan Sambong memiliki ketersediaan fasilitas pendidikan SD/MI yang sudah terpenuhi, bahkan hampir seluruh Sekolah Dasar memiliki peserta didik yang berjumlah sedikit atau kekurangan peserta didik

(*under capacity*) yang menandakan bahwa di Kecamatan Sambong termasuk kelebihan jumlah fasilitas pendidikan karena jumlah peserta didik pada setiap rombongan belajar yang ada di masing-masing sekolah tergolong sedikit.

Selanjutnya dilakukan juga analisis pada ketersediaan kelas tingkat SMP/MTs. Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2007 mengenai Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan ditetapkan bahwa satu kecamatan dilayani oleh minimum satu SMP/MTs dan setiap daerah dengan

jumlah penduduk 1000 jiwa dilayani oleh satu fasilitas pendidikan dalam jarak tempuh maksimal 6 km. Perhitungan ketersediaan ruang kelas/rombongan belajar tingkat SMP/MTs di Kecamatan Sambong berdasarkan pada jumlah penduduk usia sekolah tiap tingkat kelasnya dengan daya tampung maksimal tiap kelas yaitu 32 peserta didik, lalu dibandingkan dengan jumlah kelas eksisting yang tersedia. Sehingga dapat dilihat status ketersediannya apakah sudah terpenuhi atau belum. Hasil perhitungan ketersediaan ditampilkan pada Tabel 2.

Tabel 3. Ketersediaan Ruang Kelas SMP/MTs di Kecamatan Sambong

<b>Indikator</b>	<b>X</b>	<b>Jumlah Kelas Minimal</b>	<b>Jumlah Kelas Eksisting</b>	<b>Keterangan Pemenuhan</b>
Jumlah Penduduk Usia 13 Th (X1)	407	12	12	Terpenuhi
Jumlah Penduduk Usia 14 Th (X2)	489	12	12	Terpenuhi
Jumlah Penduduk Usia 15 Th (X3)	399	12	12	Terpenuhi

*Sumber: Olah Data Penetian*

Tersedia tiga SMP/MTs yang tersebar di Kecamatan Sambong. Sehingga berdasarkan Tabel 2 dapat diketahui bahwa ketersediaan fasilitas pendidikan yaitu sekolah

pada jenjang SMP/ sederajat di Kecamatan Sambong sudah terpenuhi, karena dengan jumlah penduduk usia SMP yang berusia 13 hingga 15 tahun sebanyak 1.202 penduduk dapat sepenuhnya terlayani

dengan 3 SMP/MTs yang ada dan setiap kelas pada ketiga SMP/MTs tidak melebihi jumlah maksimal peserta didik yaitu jumlah peserta didik tidak ada yang lebih dari 32 peserta didik. Sehingga penambahan fasilitas pendidikan SMP belum perlu dilakukan karena dengan SMP/MTs yang tersedia saat ini dapat melayani keseluruhan penduduk.

#### **D. SIMPULAN**

1. Terdapat 26 SD/MI yang tersebar di 10 desa yang ada di Kecamatan Sambong. Terdapat 1 hingga 4 SD/MI di setiap desa. Pola persebaran SD/MI di Kecamatan Sambong acak dengan nilai parameter tetangga terdekat (T) yaitu sebesar 0,52. Sama halnya dengan sebaran SMP/MTs, terdapat 3 SMP/MTs di Kecamatan Sambong. SMP/MTs didirikan untuk melayani satu kecamatan sehingga tidak di setiap desa ada SMP/MTs. Namun, karena Kecamatan Sambong cukup luas dan jarak permukiman yang cukup jauh sehingga diperlukan lebih dari 1 SMP/MTs untuk dapat melayani seluruh penduduk. Pola persebaran SD/MI di Kecamatan

Sambong adalah berpola acak dengan nilai parameter tetangga terdekat (T) yaitu sebesar 0,78. Faktor yang memengaruhi persebaran fasilitas pendidikan di Kecamatan Sambong yaitu faktor fisik dan faktor sosial. Faktor fisik yang berpengaruh antara lain penggunaan lahan, lokasi, jarak dan aksesibilitas. Sedangkan faktor sosial yang berpengaruh adalah jumlah penduduk.

2. Ketersediaan sarana pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Sambong berdasarkan pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan SD/MI dibagi menjadi 3 kelas yaitu sangat memenuhi, memenuhi, dan kurang memenuhi.

3. Kondisi dan kualitas sarana dan prasarana SD/MI yang ada di Kecamatan Sambong belum memenuhi terutama pada ketersediaan sarana pendidikannya. Karena sarana yang tersedia masih minim baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sedangkan kondisi dan kualitas sarana dan prasarana SMP/MTs yang ada di Kecamatan Sambong mayoritas sudah baik dan beberapa ada yang rusak ringan. Secara keseluruhan, sarana dan prasarana SD/MI dan SMP/MTs mayoritas masih tergolong kurang

memenuhi, sehingga perlu dilakukan penambahan atau perbaikan sarana dan prasarana.

4. Ketersediaan fasilitas pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kecamatan Sambong sudah terpenuhi dari segi jumlah sekolah dan kelas yang dibutuhkan. Karena dikaji dari jumlah penduduk usia sekolah, maka SD/MI minimal yang yaitu 13 SD/MI. Sedangkan pada tingkat SMP/MTs jumlah penduduk usia sekolah (13 hingga 15 tahun) yaitu 1.202 jiwa. Maka Sekolah Menengah Pertama minimal yang diperlukan berdasarkan Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yaitu 1 sekolah, tetapi pada Tahun 2020 terdapat 3 SMP/MTs yang ada di Kecamatan Sambong. Pada kondisi eksisting jumlah SD/MI yang ada saat ini yaitu 26 SD/MI dan 3 SMP/MTs, sehingga kebutuhan fasilitas pendidikan di Kecamatan Sambong sudah terpenuhi.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Arum, Wahyu Sri A. (2007). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Jakarta: Multi Karya Mulia
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora. Kecamatan Sambong Dalam Angka 2019
- Bintarto, R, & Hadisumarmo, S. (1991). *Metode Analisa Geografi*. Jakarta: LP3S
- Creswell, John. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed Edisi Ketiga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Furchan, Arief. (2011). *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hamzah, Faris., Aulia, D.N., & Marisa, Amy. (2020). *The Distribution Pattern Analysis of Housing in Medan Using the Nearest Neighbor Analysis Approach*. International Journal of Earth and Environmental Science. 1775-1315/452. Diperoleh 23 September 2020 dari <https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/452>
- Hartanto, Irfan G. (2017). Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dalam Program Kelas Khusus Olahraga (KKO) Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sewon Kabupaten Bantul. *Jurnal Hanata Widya*. (7). Diperoleh 11 Januari 2020 dari <http://journal.student.uny.ac.id/ojs/index.php/fipmp/article/download/8556/8160>

- Henlita, S. & Handayani, K. D. (2013). Tingkat Pelayanan Fasilitas Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Teknik Pomits*. (2). Diperoleh 11 Januari 2020, dari [http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik\\_nik/article/view/3927](http://ejournal.its.ac.id/index.php/teknik_nik/article/view/3927)
- Indarto & Faisol, A. (2012). *Konsep Dasar Analisis Spasial*. Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Kurniawan, H. (2017). Pengaruh Standart Sarana dan Prasarana terhadap Efektifitas Pembelajaran di TK Al-Firdaus. *Jurnal Pendidikan*. 02 (02), 14-16. Diperoleh 10 Januari 2020, dari <https://jurnal.fkip-uwgm.ac.id/index.php/warna/article/download/191/111>
- Martono, Agus D. (2013). *Metode Pengambilan Sampel Untuk Penelitian Geografi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Mawardi, Edi, Aulia, B., & Abdullah. (2018). Kajian Konsep Operasional Pemeliharaan Gedung SMA Bina Generasi Bangsa Meulaboh Aceh Barat. *Jurnal Teknik Sipil*, 1, (4) 814. Diperoleh 10 Januari 2020, dari <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/JTS/article/view/10041/7917>
- Nawawi, H. (1995). *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Purwanto, Ngalim. (2014). *Ilmu dan Pendidikan Teoritis Dan Praktis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Purwanto, Nanang. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sudjana. (2002). *Metode Statistika*. Bandung: Tarsito
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Tanjung, F Z., Annisa, M. & Ridwan. (2016). Analisis Sarana Dan Prasarana Sekolah Dasar Berdasarkan Tingkat Akreditasi



- Di Kota Tarakan. *Jurnal Pendidikan Indonesia*. (05). Diperoleh 9 Januari 2020, dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/8934>
- Tika, Moch Pabundu. (1997). *Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Tirtarahardja, U, & La, Sulo. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Triwiyanto, T. (2014). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan